



BONGKAR SELURUH 'MAFIA' TENAGA ALIHDAYA DI BALAIKOTA

## Libatkan Pejabat, Pintu Masuk bagi Kejaksanaan dan Kepolisian

YOGYA (KR) - Dugaan gratifikasi berupa permintaan sejumlah uang hingga puluhan juta rupiah bagi calon tenaga alihdaya atau outsourcing untuk bisa bekerja di Balaikota Yogya terus bergulir. Hal itu dinilai menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum baik kejaksanaan maupun kepolisian lantaran diduga melibatkan oknum pejabat berstatus ASN.

Anggota DPRD Kota Yogya Antonius Fokki Ardiyanto yang mendapat aduan dari sejumlah korban menilai, kasus tersebut sudah masuk ranah pidana. "Ini bisa menjadi pintu masuk bagi kejaksanaan dan kepolisian karena sudah masuk dalam dugaan tindak pidana korupsi," tandasnya, Minggu (21/5).

Dugaan gratifikasi itu pun tidak hanya berhembus begitu saja. Menurutnya hal tersebut sudah terjadi sejak beberapa tahun namun tidak semua korban mau membuka suara. Apalagi Inspektorat Kota Yogya ternyata juga sudah melakukan pemeriksaan hingga investigasi. Kasus dugaan gratifikasi sudah masuk dalam kadar pengawasan

an dan tengah menunggu proses kesimpulan akhir untuk direkomendasikan ke kepala daerah terkait sanksi disiplin PNS yang bakal diterapkan. Khususnya kasus dugaan gratifikasi tenaga alihdaya pengamanan Balaikota yang melibatkan oknum pejabat yang sempat berdinasi di Sat Pol PP Kota Yogya.

Fokki menilai, dengan masuknya kasus itu dalam kadar pengawasan membuktikan ada potensi pelanggaran yang telah dilakukan oleh oknum tersebut. Apalagi, selain eks pejabat di Sat Pol PP, ternyata masih ada satu aduan lagi yang masuk dalam kadar pengawasan.

"Ini sudah menjadi bola salju. Ada laporan lain yang ma-

suk, modusnya sama tapi di OPD lain. Rupanya ada mafia untuk tenaga outsourcing di Balaikota. Ini harus dibongkar dan kejaksanaan serta kepolisian bisa ikut melakukan penanganan dari aspek tindakan korupsinya," urainya.

Sementara itu anggota Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Kota Yogya Baharudin, berharap para pegawai alihdaya yang pernah dimintai sejumlah uang untuk bisa bekerja di komplek Balaikota, agar melapor. Tidak hanya yang berada di bawah kewenangan Sat Pol PP Kota Yogya melainkan juga di OPD lain. Hal ini supaya seluruh proses perekrutan tenaga kerja yang melenceng dari aturan dapat ditelusuri dengan baik. Jangan sampai karena takut melapor menjadikan gratifikasi sebagai budaya dalam perekrutan tenaga kerja alihdaya di komplek Balaikota.

"Terbukanya tabir yang selama ini menjadi kasak-kusuk, justru momentum untuk membuka semua yang

ada di OPD lain," tandasnya. Pihaknya pun juga siap membuka layanan untuk

menampung pengaduan dari para korban. Aduan bisa melampirkan bukti pen-

dukung guna mempermudah proses pengusutan bagi pihak yang berwenang. Forpi Kota

Yogya, imbu Baharudin, menjamin penuh kerahasiaan identitas korban. (Dhi-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 22 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005